

---

# PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SUMEDANG

Siti Asyarah

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang

---

## Article Info

### Article history:

Received Sep 12, 2024

Revised Des 12, 2024

Accepted Des 18, 2024

---

### Keywords:

Public Policy

Management Information System

Public Policy Implementation

Local Government Information System

Development Data and

Information Management

## ABSTRACT

*This research aims to examine and analyze the influence of implementing regional development information system policies on regional development data and information management. The research method used is a descriptive analysis method using survey techniques, with research variables consisting of the independent variable, namely Implementation of Regional Development Information System Policy, and the dependent variable, namely Data Management and Development Information. The research population was 30 people, consisting of all regional apparatus within the Sumedang Regency government. The sampling technique used a saturated sample or census, that is, the entire research population was used as respondents in the research. Data collection techniques were carried out using documentation studies and field studies through the distribution of questionnaires. The technical data analysis carried out in this research is a path analysis model (Path Analysis). The results of testing the main hypothesis show that the implementation of Regional Development Information System Policy (X) has an influence on Development Data and Information Management (Y). The influence of regional development information system policy implementation (X) on development data and information management (Y) is 46.2%. Suggestions for improving problems in implementing regional development information system policies are that improvements to the bureaucratic structure still require improvement, especially for SOPs for policy implementation that need to be prepared/established, apart from that the data also shows that it is still necessary to clarify the division of tasks and functions. As for Data and Information Management that needs to be improved, it is in the dimension of Mobilizing Data Management and Development Information, especially in the issue of providing incentives and disincentives from leaders to data managers.*



Copyright © 2024 JRPA. All rights reserved.

---

## Corresponding Author:

Siti Asyarah

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang

Jalan Prabu Gajah Agung No. 9 Kelurahan Situ - Sumedang

Email: [aasasyarah226@gmail.com](mailto:aasasyarah226@gmail.com)

---

## 1. INTRODUCTION

Fenomena masalah yang dihadapi dalam manajemen data dan informasi pembangunan antara lain adalah banyak data yang tidak tersedia atau tidak lengkap di Perangkat Daerah sebagai sumber data/produsen data, data jarang diperbaharui, minimnya pendanaan dan keterbatasan personil untuk pengelolaan data, terdapat jenis atau elemen data yang sama dari sumber yang berbeda namun jumlahnya berbeda, sumber data tidak hanya Perangkat Daerah namun juga instansi vertikal di daerah. Dengan demikian diperlukannya manajemen data yang baik dan terpadu baik secara horizontal maupun vertikal. Dalam hal ini pemerintah sudah beberapa kali menerbitkan kebijakan terkait dengan sistem informasi pemerintahan daerah yaitu yang terakhir berupa aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (sipd.go.id), SIPD adalah kebijakan pemerintah terkait dengan system informasi pemerintahan daerah yang meliputi informasi Pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahandaerah lainnya.\

Sebagai gambaran nyata dari fenomena tersebut diatas dapat memperhatikan aplikasi ketersediaan data dan informasi pembangunan saat ini untuk 5 tahun terakhir yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Gambar 1. Ketersediaan Data Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2021**

No	Kode SSD	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	1.01.000001	Asrama sekolah Jumlah 1.01 SPN Kab Kgd Kbc 1.01.02.1.01.0013 1.01.02.1.01.0038 1.01.02.1.01.0099 1.01.02.1.02.0009 1.01.02.1.02.0022 1.01.02.1.02.0071 1.01.02.1.03.0067 1.01.02.1.03.0083 1.01.02.1.03.0070 1.01.02.2.02.0006 1.01.02.2.02.0028 1.01.02.2.02.0061 1.01.02.3.05.0011 1.01.02.3.05.0030 1.01.02.3.06.0004 1.01.02.3.06.0022 1.01.02.4.05.0011 1.01.02.4.05.0036 1.01.02.4.06.0009 1.01.02.4.06.0022	Unit definis ops								
2	1.01.000002	Asrama sekolah yang perlu direhabilitasi Jumlah 1.01 SPN Kab Kgd 1.01.02.1.01.0099 1.01.02.1.02.0071 1.01.02.1.03.0076 1.01.02.2.02.0061	Unit definis ops								
3	1.01.000003	Asrama sekolah yang layak	Unit								

Sumber : Aplikasi sipd.go.id, November 2024

**Gambar 2. Ketersediaan Data Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

Kode Penda	Jml Isian	Tersi	Postdate	Verifikasi Walidata	Verifikasi Pembina Data	% Verifikasi	Final	Postdate Final
3211	0	5183	453	2024-11-04 15:25:40	359	357	7 %	0

Sumber : Aplikasi sipd.go.id, November 2024.

Gambar 3. Ketersediaan Data Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2023

Kode Penda	Jml Isian	Terisi	Postdate	Verifikasi Walidata	Verifikasi Pembina Data	% Verifikasi Final	Postdate Final
3211	0	5183	76	2024-11-07 09:41:24	76	0	1%

Sumber : Aplikasi Sumber : Aplikasi sipd.go.id, November 2024.

Gambar 4. Ketersediaan Data Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2024

Kode Penda	Jml Isian	Terisi	Postdate	Verifikasi Walidata	Verifikasi Pembina Data	% Verifikasi Final	Postdate Final
3211	0	5183	74	2024-10-01 15:12:16	0	0	0%

Sumber : Aplikasi sipd.go.id, November 2024.

Data adalah merupakan bahan mentah yang harus diolah sehingga menghasilkan informasi, sehingga untuk menghasilkan informasi yang mampu mendukung proses pengambilan keputusan haruslah berasal dari data yang berkualitas yaitu sesuai dengan persyaratan informasi yaitu memenuhi paling sedikit lima persyaratan (Siagian, 2015 ; 76), yaitu lengkap, mutakhir, akurat, dapat dipercaya, dan disimpan sedemikian rupa sehingga mudah ditelusuri untuk digunakan sebagai alat pendukung proses pengambilan keputusan apabila diperlukan. Seluruh informasi yang telah terkumpul dan terolah harus disimpan sedemikian rupa sehingga (a) siapa pun yang memerlukannya dan memang berhak untuk itu dapat memperolehnya tanpa kesulitan apa pun, dan (b) sebaliknya tidak mudah diperoleh oleh pihak-pihak yang tidak berhak memilikinya.

Senada dengan Siagian, Certo dan Certo (2006; 534) dalam Wasitiono, Sadu (2013; 2) menyebutkan beberapa faktor yang menentukan kebernilaian dari informasi, yaitu :

1. Ketepatan informasi; ketepatan ini diartikan kesesuaian informasi dengan situasi yang sedang dihadapi oleh si pengguna informasi itu sendiri.
2. Mutu informasi; kadar mutu informasi ditentukan oleh sejauhmana informasi itu mencerminkan realitas. Semakin mendekati realitas, informasi bisa dikatakan bermutu.
3. Informasi yang up to date; adalah informasi yang pada saat digunakan memungkinkan untuk digunakan sebagai bahan pembuatan putusan dan organisasi bisa mendapat manfaat dari informasi itu.
4. Kuantitas informasi; adalah jumlah dari informasi yang terkait dengan proses pengambilan putusan yang dilakukan manajer.

Para pengelola data dan informasi harus dapat menjamin bahwa (a) mutu data yang dikumpulkan tinggi, (b) relevan dengan kepentingan pemakainya, (c) digali dari sumber yang dapat dipercayai, baik internal maupun eksternal. (Siagian, 2015; 81).

Saat ini merupakan era informasi, dimana informasi merupakan salah satu sumber daya dalam berbagai aspek kehidupan terlebih dalam penyelenggaraan pemerintahan. Teknologi informasi (TI) modern ditemukan pada akhir 1970-an dan secara umum mengacu pada istilah yang mencakup pada teknologi komputer, komunikasi, dan perangkat lunaknya. (Wasistiono, Sadu, 2013; 3).

Implementasi kebijakan adalah merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan, ada banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana diungkapkan oleh Jones (1980) dalam Suaib Muhammad Ridha (2016; 82), dimana implementasi diartikan sebagai “getting a job done” dan “doing a”. Tetapi dibalik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah, namun pelaksanaannya menuntut adanya syarat yang antara lain : adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut resources. Lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan.

Ada banyak kebijakan yang disusun oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kebijakan disusun secara baik dengan berbagai kondisi ideal terdapat didalamnya, namun pada saat implementasi tidak jarang terjadinya kesulitan atau bahkan kegagalan. Fenomena tersebut sejalan dengan yang dikaji oleh Presman dan Wildavsky (Purwanto Erwan Agus & Sulistyastuti Dyah Ratih, 2015; 2) bahwa ditemukan dilapangan tentang banyaknya kegagalan implementasi berbagai kebijakan dan program pembangunan pemerintah.

Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab kegagalan implementasi kebijakan (kompilasi dari beberapa hasil penelitian terhadap kegagalan implementasi program pembangunan) antara lain adalah:

1. Kurangnya sosialisasi kebijakan;
2. Sikap dan perilaku pelaksana kebijakan;
3. Lemahnya mekanisme pengawasan;
4. Lemahnya koordinasi antara pelaksana;
5. Kurangnya komunikasi
6. Lemahnya dukungan pemerintah daerah;
7. Rendahnya pengetahuan kelompok sasaran terhadap program yang diimplementasikan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan variabel manajemen data dan informasi pembangunan dan variabel implementasi kebijakan sistem informasi pemerintahan daerah. Adapun tujuannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan kebijakan sistem informasi pembangunan daerah terhadap manajemen data dan informasi pembangunan di Kabupaten Sumedang.

## 2. METHOD

Dalam hal penelitian ini metode yang akan digunakan adalah metode deskriptif analisis menggunakan teknik survey, penelitian deskriptif adalah penelitian yang ada hubungannya dengan pemaparan suatu fenomena atau hubungan antara dua atau lebih fenomena, dan metode ini seringkali menggunakan teknik Survey. Pada penelitian deskriptif dapat diperluas ruang lingkup penelitiannya, masalah yang akan diselidiki dinyatakan dengan sangat tajam dan lebih ekonomis, dan karena itu akan mampu mengidentifikasi unsur-unsur khas yang spesifik. Iskandar (2015:174-176).

Berdasarkan rumusan masalah, variabel penelitian bersifat Causal Effectual maka terdapat 2 kelompok variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Dalam usulan penelitian ini variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut :

1. Variabel bebas (*independen variabel*), adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel terikat yaitu Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah, dinotasikan dengan X, adapun dimensi-dimensi yang diukur adalah: 1) Komunikasi; 2) Sumber daya; 3) Sikap/Watak; dan 4) Struktur Birokrasi.
2. Variabel terikat (*dependen variabel*), adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas yaitu Manajemen Data dan Informasi Pembangunan, dinotasikan dengan Y, adapun dimensi-dimensi yang diukur adalah: 1) Perencanaan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan; 2) Pengorganisasian Data dan Informasi Pembangunan; 3) Penggerakan/ Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan; dan 4) Pengendalian Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan.

**Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Variabel	Dimensi	Indikator	Butir Item	No Item	
Variabel X Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Model George C Edwards III, 1980. (Suranto, 2014; 38)	1. Komunikasi	1. Transmisi	1. Kebijakan telah disampaikan ke pemangku kepentingan	1	
			2. Ketepatan saluran komunikasi	2	
		2. Kejelasan	1. Kejelasan tujuan kebijakan 2. Kejelasan perintah	3 4	
	2. Sumber daya	3. Konsistensi	1. Sumberdaya manusia	1. Konsistensi pemberian arahan 2. Konsistensi penerimaan arahan	5 6
				2. Informasi	1. Jumlah Pegawai 2. Kompetensi Pegawai
		3. Kewenangan	1. Kejelasan informasi 2. Kemudahan informasi		9 10
			4. Fasilitas	1. Penyesuaian wewenang dengan kedudukan 2. Dampak yang diperoleh atas pendelegasian wewenang	11 12
		3. Disposisi/ Perilaku		4. Kelengkapan fasilitas 2. Pemanfaatan TI	13 14
			1. Pemahaman	1. Pemahaman pegawai terhadap kebijakan 2. Kemampuan pegawai dalam implementasi kebijakan	15 16
		2. Komitmen		1. Tanggung jawab pegawai 2. Ketaatan pegawai	17 18
			4. Struktur Birokrasi	1. Prosedur Standar	1. Ketersediaan SOP 2. Penyesuaian tanggung jawab
	2. Tugas dan Pembagian Tugas	1. Tugas pokok dan fungsi 2. Pembagian tugas dan fungsi			21 22
		Variabel Y Manajemen Data dan Informasi Pembangunan Model G.R Terry (Iskandar, 2015; 239)		1. Perencanaan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	1. Jenis dan Elemen Data
	2. Metoda		1. Pengumpulan data 2. Pengolahan data		
			3. Format Pelaporan		Format baku
	4. Waktu Pelaporan		1. Pelaporan rutin 2. Pelaporan tertentu		28 29
			5. Anggaran		1. Usulan penganggaran 2. Ketersediaan anggaran
	Pengorganisasian Data dan Informasi Pembangunan			1. Pengelola data dan informasi	1. Tim pengelola data dan informasi 2. Pembagian tugas

Variabel	Dimensi	Indikator	Butir Item	No Item
	Daerah		pengelolaan	
		2. Pengumpulan data dan informasi	1. Kompetensi pengumpul Metode pengumpulan	34
		3. Pengolahan data dan informasi	1. Kompetensi pengolah 2. Metode pengolahan	35 36
		4. Analisis data	1. Kompetensi penganalisis 2. Metode analisis	37 38
		5. Pelaporan	1. Kompetensi penyusun laporan 2. Bentuk laporan (kebutuhan)	39 40
		6. Penyebarluasan data dan informasi	Media elektronik	41
	3. Penggerakan Pengelolaan Data dan Infor masi Pembangunan Daerah	1. Perintah	1. Melaksanakan tugas 2. Pengalokasian anggaran	42 43
		2. Insentif dan disinsentif	1. Pemberian insentif 2. Pemberian disinsentif	44 45
		3. Pemenuhan sarana dan prasarna	1. Kelengkapan sarana dan prasarana 2. Pemanfaatan teknologi informasi	46 47
	4. Pengendalian Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	1. Pengukuran	Bentuk pengukuran	48
		2. Tindakan korektif	1. Mengubah standar 2. Mengubah interpretasi penyimpangan	49 50

### 3. RESULTS AND DISCUSSION

#### 3.1. Results

Kebijakan sistem informasi pembangunan daerah terhadap manajemen data dan informasi pembangunan, secara empiric dapat dapat diterima. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem informasi pemerintahan daerah secara parsial telah mampu mempengaruhi manajemen data dan informasi pembangunan. Dengan hasil analisis regresi antara **Total\_X** (implementasi kebijakan SIPD) dan **Total\_Y** (manajemen data dan informasi pembangunan) menunjukkan hubungan berikut:

1. **Koefisien regresi:** Konstanta: -46,69 (tidak signifikan,  $p=0.130$   $p = 0.130$ ). Total\_X: 1,66, yang signifikan secara statistik ( $p < 0.001$   $p < 0.001$ ). Artinya, setiap peningkatan 1 unit pada Total\_X dihubungkan dengan peningkatan 1,66 unit pada Total\_Y.
2. **Kekuatan hubungan:**  $R^2=0.462$   $R^2 = 0.462$ : Sekitar 46,2% variasi dalam Total\_Y dapat dijelaskan oleh Total\_X. Sisanya (53,8%) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.
3. **Signifikansi model:** Model regresi secara keseluruhan signifikan ( $F=24.04$ ,  $p=3.61 \times 10^{-5}$   $F = 24.04$ ,  $p = 3.61 \times 10^{-5}$ ), menunjukkan bahwa variabel independen (Total\_X) memiliki pengaruh yang nyata terhadap variabel dependen (Total\_Y).

**Interpretasi:** Implementasi kebijakan SIPD (Total\_X) memiliki hubungan positif dan signifikan dengan manajemen data dan informasi pembangunan (Total\_Y). Artinya, semakin baik implementasi kebijakan. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, semakin baik pula manajemen data dan informasi pembangunan. Namun, hubungan ini tidak sepenuhnya menjelaskan variasi pada variabel Y, sehingga faktor

lain mungkin juga berkontribusi.

Pengelolaan data dan informasi pembangunan pada setiap Perangkat Daerah tidak hanya diatur oleh kebijakan sistem informasi pembangunan daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri namun terdapat juga kebijakan-kebijakan lainnya yang diberlakukan oleh kementerian/lembaga/instansi lainnya untuk kepentingan manajemen data dan informasi sesuai dengan ruang lingkup urusannya, seperti urusan pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanian, pariwisata, perindustrian dan perdagangan, serta urusan lainnya, dengan berbagai format dan metode yang berbeda-beda, sehingga manajemen data dan informasi pembangunan pada setiap Perangkat Daerah dipengaruhi juga oleh kebijakan yang berbasis bidang urusannya masing-masing.

### 3.2. Discussion

Analisis menggunakan analisis jalur (path analysis) antara X dan Y, kita perlu melakukan langkah- langkah berikut :

1. Menghitung skor total untuk masing-masing variabel (X dan Y).
2. Membangun model regresi untuk menguji hubungan langsung dan tidak langsung antara X dan Y.
3. Menganalisis hasil regresi dan menafsirkan hubungan kausal antara kedua variabel

Hasil pengujian terhadap hipotesis penelitian menunjukkan bahwa secara empiric hipotesis utama dapat diterima yaitu implementasi kebijakan sistem informasi pembangunan daerah berpengaruh nyata terhadap manajemen data dan informasi pembangunan.

Dengan rincian Variabel X Rata-rata: 87,73, Standar deviasi: 10,25, Minimum: 62, Maksimum: 110. Variabel Y Rata-rata: 99,03, Standar deviasi: 25,05, Minimum: 58, Maksimum: 145, Hasil analisis regresi antara **Total\_X** (implementasi kebijakan SIPD) dan **Total\_Y** (manajemen data dan informasi pembangunan) menunjukkan hubungan berikut:

1. **Koefisien regresi:**
  - o Konstanta: -46,69 (tidak signifikan,  $p=0.130$   $p = 0.130$ ).
  - o Total\_X: 1,66, yang signifikan secara statistik ( $p<0.001$   $p < 0.001$ ). Artinya, setiap peningkatan 1 unit pada Total\_X dihubungkan dengan peningkatan 1,66 unit pada Total\_Y.
2. **Kekuatan hubungan:**
  - o  $R^2=0.462$   $R^2 = 0.462$ : Sekitar 46,2% variasi dalam Total\_Y dapat dijelaskan oleh Total\_X. Sisanya (53,8%) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.
3. **Signifikansi model:**

Model regresi secara keseluruhan signifikan ( $F=24.04$ ,  $p=3.61 \times 10^{-5}$   $F = 24.04$ ,  $p = 3.61 \times 10^{-5}$ ), menunjukkan bahwa variabel independen (Total\_X) memiliki pengaruh yang nyata terhadap variabel dependen (Total\_Y).

#### Interpretasi:

Implementasi kebijakan SIPD (Total\_X) memiliki hubungan positif dan signifikan dengan manajemen data dan informasi pembangunan (Total\_Y). Artinya, semakin baik implementasi kebijakan SIPD, semakin baik pula manajemen data dan informasi pembangunan. Namun, hubungan ini tidak sepenuhnya menjelaskan variasi pada variabel Y, sehingga faktor lain mungkin juga berkontribusi.

- a. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam implementasi kebijakan sistem informasi pembangunan daerah adalah yang berkaitan dengan Dimensi Struktur Birokrasi yang terdiri dari:
  - a) SOP untuk implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
  - b) Pembagian tugas dan fungsi sudah jelas dalam rangka implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
  - c) Penyesuaian tanggung jawab sudah mendukung implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
  - d) Tugas pokok dan fungsi jabatan sudah mendukung implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- b. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam manajemen data dan informasi pembangunan, terdapat pada 2 dimensi yaitu pada dimensi Penggerakan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan dan dimensi Pengendalian Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan, dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Dimensi Penggerakan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan, terdiri atas:
    - 1) Pimpinan memberikan disinsentif bagi pengelola data dan informasi pembangunan yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar
    - 2) Pimpinan memberikan insentif bagi pengelola data dan informasi pembangunan yang melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar
  - b) Dimensi Pengendalian Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan
    - 1) Adanya perubahan standar kinerja untuk memperbaiki tingkat capaian tujuan/kinerja
    - 2) Adanya perubahan interpretasi penyimpangan untuk memperbaiki tingkat capaian tujuan/kinerja

#### 4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Pendapat responden mengenai variabel Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah, menunjukkan nilai yang cukup baik dan perlu upaya untuk ditingkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan sudah dikomunikasikan dengan baik, sumber daya dalam implementasi juga sudah baik, pelaksana kebijakan sudah mengetahui akan kebijakan sistem informasi pembangunan daerah yaitu berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Namun data menunjukkan bahwa untuk dimensi struktur birokrasi masih memerlukan perbaikan terutama untuk SOP untuk implementasi kebijakan perlu untuk disusun/ditetapkan, selain dari itu data juga menunjukkan masih perlu untuk memperjelas dalam pembagian tugas dan fungsi.
- b. Pendapat responden mengenai variabel Manajemen Data dan Informasi Pembangunan sudah cukup baik dan perlu untuk ditingkatkan, data menunjukkan bahwa Dimensi Perencanaan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan, Dimensi Pengorganisasian Data dan Informasi Pembangunan sudah cukup baik, yang perlu ditingkatkan adalah pada dimensi Penggerakan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan terutama pada masalah pemberian insentif dan disinsentif dari pimpinan ke pengelola data. Juga pada dimensi Pengendalian Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan masalah standar kinerja dan interpretasi penyimpangan Dimana keduanya untuk memperbaiki tingkat capaian tujuan/kinerja

#### REFERENCES

- Iskandar, Jusman, 2015. *Kapita Selekta Administrasi Negara*, Bandung, Puspaga.
- Iskandar, Jusman, 2015. *Metoda Penelitian Administrasi*, Bandung, Puspaga.
- Purwanto, Erwan Agus, dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*, Yogyakarta, Gava Media.
- Siagian, Sondang, 2015. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Suaib, Muhammad Ridha, 2016. *Pengantar Kebijakan Publik Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan*, Yogyakarta, Calpulis.
- Suranto, 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan, Penelusuran Konsep dan Teori, Implementasi Kebijakan Otonomi Pelayanan Pendidikan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Wasistiono, Sadu, 2013. *Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan, Konsep dan Aplikasinya pada Organisasi Pemerintahan/Pemda*. Bandung, IPDN Press.